KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
30 September 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusnan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga tanggal 30 Desember 2013 dan Peraturan Kemernterian Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lubuk Sikaping, 30 September 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Yuliardi, SH
NIP. 197307031993031002

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jalan. A. Yani No. 13.A Lubuk Sikaping Telp.(0753) 20205
Fax. (0753) 321753– www.kab-pasaman.kpu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan 3 Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubuk Sikaping, 30 September 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,

Yuliardi, SH

NIP. 197307031993031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Triwulan 3 Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Triwulan III TA 2022 adalah Rp.32.940.300,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Negara pada Triwulan III TA 2022 adalah sebesar Rp. 174.970.016,- atau mencapai 55% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.588.342.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2023.

Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 1.368.997.151,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 208.000.000,-, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 1.125.874.359,- dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 133.146.363,-, Utang yang belum ditagihkan sebesar Rp. 92.030.779 dan Uang Muka dari KPPN sebesar Rp. 208.000.000,- serta Ekuitas sebesar Rp. 1.368.997.151,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar

Rp0,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 12.229.460.291,- dan surplus (defisit) dari kegiatan operasional sebesar (Rp. 12.229.460.291),-, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 67.453.878,- sehingga terdapat Surplus (Defisit) LO senilai Rp.(12.162.006.413,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp 1.193.635.637,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(12.162.006.413,-) kemudian ditambah dengan transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 11.904.190.785,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adaiah senilai Rp. 935.820.009.-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CalK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CalK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode 30 September Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEBER 2023 DAN 30 SEPTEMER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TRIWULAN III 2023		% thd Angg	TRIWULAN III 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	32.940.300	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	**32.940.300**	**0,00**	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	2.583.346.000	2.155.347.230	83,43	2.084.592.065
Belanja Barang	B.4	13.812.834.000	9.781.783.855	70,82	436.745.747
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		**16.396.180.000**	**11.937.131.085**	**72,80**	**2.521.337.812**
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	23.000.000	-	0,00	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.10		-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		**23.000.000**	-	**0,00**	-
JUMLAH BELANJA		**16.419.180.000**	**11.937.131.085**	**72,70**	**2.521.337.812**
JUMLAH BELANJA		**16.419.180.000**	**11.937.131.085**	**72,70**	**2.521.337.812**

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NERACA
PER 30 September 2023 DAN 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	208.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNBP	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8		
Persediaan	C.9	-	-
Persediaan Belum Diregister	C.10		
Jumlah Aset Lancar		208.000.000	-
ASET TETAP			
Tanah	C.11	415.483.968	415.483.968
Peralatan dan Mesin	C.12	2.126.879.118	2.550.892.638
Gedung dan Bangunan	C.13	412.582.000	412.582.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.14		
Aset Tetap Lainnya	C.15	40.000.000	40.000.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.16		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.17	(1.869.070.727)	(2.216.278.969)
Jumlah Aset Tetap		1.125.874.359	1.202.679.637
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagiahn Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.18	35.331.245	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR	C.19	(208.453)	-
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)	C.20	35.122.792	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		35.122.792	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	26.368.800	26.368.800
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(26.368.800)	(26.368.800)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		**1.368.997.151**	**1.202.679.637**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	133.146.363	9.044.000
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.25	92.030.779	-
Uang Muka dari KPPN	C.26	208.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		433.177.142	9.044.000
JUMLAH KEWAJIBAN		433.177.142	9.044.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	935.820.009	1.193.635.637
JUMLAH EKUITAS		935.820.009	1.193.635.637
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.368.997.151**	**1.202.679.637**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 30 SEPTEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2023	30 September 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai		2.279.449.593	2.210.376.724
Beban Persediaan	D.3	14.515.500	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	8.714.467.263	170.682.680
Beban Pemeliharaan	D.5	113.157.150	90.664.959
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.031.674.721	168.220.758
Beban Barang untuk Diserahkan	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	75.987.611	104.874.942
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	208.453	-
Beban Lain-lain	D.11		-
JUMLAH BEBAN		**12.229.460.291**	**2.744.820.063**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(12.229.460.291)**	**(2.744.820.063)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus(defisit) pelepasan Aset Non	D.12	4.941.433	174.969.998
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		5.759.100	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		817.667	
Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	62.502.445	18
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		67.443.878	174.970.016
		(12.162.016.413)	(2.569.850.047)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(12.162.016.413)**	**(2.569.850.047)**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMER 2023 DAN 30 SEPTEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2023	30 September 2022
EKUITAS AWAL	E.1	1.193.635.637	1.637.378.793
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(12.162.006.413)	(2.569.850.047)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
LAIN-LAIN			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3		-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	-	-
Selisih Revaluasi Aset tetap	E.5	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	-	-
Koreksi Lain-Lain		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	11.904.190.785	2.346.367.796
EKUITAS AKHIR		**935.820.009**	**1.413.896.542**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.13a Lubuk Sikaping Pasaman Sumatera Barat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berkomitmen dengan visi "Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam

menyelenggarakan Pemilihan Umum;

- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta

laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Rp32.940.300,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp.32.940.300,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Triwulan III Tahun 20223		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	32.940.300	0%

Realisasi Belanja Negara Rp.11.937.131.085,-

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar Rp.11.937.131.085,- atau 73% dari anggaran belanja sebesar Rp.16.419.180,- adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Triwulan III Tahun 2023

URAIAN	Triwulan III Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real.Angg
Belanja Pegawai	2.583.346.000	2.155.347.230	83
Belanja Barang	13.812.834.000	9.781.783.855	71
Belanja Bantuan Sosial	-		
Belanja Modal	23.000.000	-	0
Total Belanja Kotor	**16.419.180.000**	**11.937.131.085**	73
Pengembalian belanja			
Jumlah	**16.419.180.000**	**11.937.131.085**	**73**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

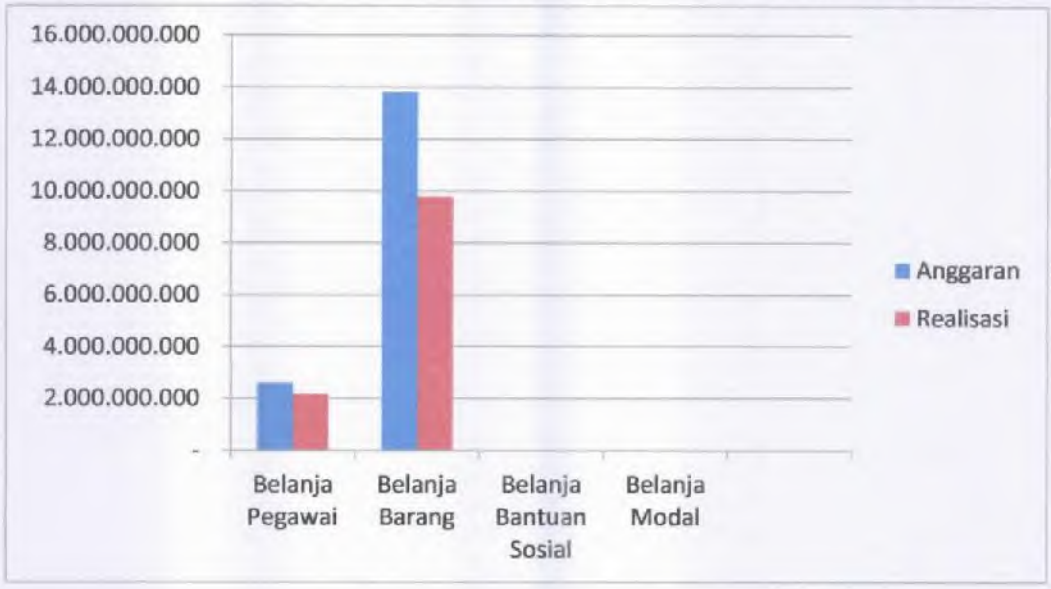

Dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2022, Realisasi Belanja Triwulan III Tahun 2022 mengalami Kenaikan sebesar 374% dibandingkan realisasi belanja pada Triwulan III Tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan III Tahun 2023 merupakan Tahun Tahapan Pemilu 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Triwulan III Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	Triwulan III 2023	Triwulan III 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.155.347.230	2.084.592.065	3,39
Belanja Barang	9.781.783.855	436.745.747	2.139,70
Belanja Bantuan Sosial			
Belanja Modal	23.000.000	-	-
Jumlah	**11.960.131.085**	**2.521.337.812**	**374,36**

Belanja Pegawai Rp.2.155.347.230,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.155.347.230,- dan Rp. 2.084.592.065. Realisasi belanja Triwulan III Tahun 2023 mengalami Kenaikan sebesar 9,68 persen dari Triwulan III Tahun 2021, dikarenakan adanya kenaikan pangkat dan alih status pegawai DPK pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman.

Perbandingan Belanja Pegawai Triwulan III Tahun 2023 *dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023 Triwulan III	REALISASI TA 2021 Triwulan III	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.155.347.230	2.084.592.065	3,39
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium			
Belanja Lembur			
Belanja Vakasi			
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
Jumlah Belanja	**2.155.347.230**	**2.084.592.065**	**3,39**

Belanja Barang dan Jasa Rp.9.781.783.855,-

B.4 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.781.783.855,- dan Rp. 436.745.747,-. Realisasi Belanja Barang Triwulan III Tahun 2023 mengalami Kenaikan sebesar 2.139,83% dari Realisasi Belanja Barang Triwulan III Tahun 2022. Hal ini antara lain disebabkan pada Triwulan III tahun 2023 merupakan Tahun Tahapan Pemilu 2024.

Perbandingan Belanja Barang Triwulan III Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi Triwulan III 2022	Realisasi Triwulan III 2021	%
beban Keperluan Perkantoran	24.240.200	18.843.000	28,64
beban Honor Operasional Satuan Kerja	86.060.000	63.680.000	35,14
belanja barang persedian barang konsumsi	14.570.500	7.125.500	100,00
beban Bahan	528.564.050	12.740.500	100,00
beban Barang Operasional Lainnya	25.100.000	25.340.000	100,00
beban Honor Output Kegiatan	6.763.850.000	0	#DIV/0!
beban Barang Non Operasional Lainnya	1.168.761.055	3.202.000	-
beban Langganan Listrik	7.376.584	6.147.272	20,00
beban Langganan Telepon	5.131.532	6.170.654	(16,84)
beban Langganan Air	1.268.800	666.750	90,30
beban Sewa	36.150.000	1.000.000	-
beban pengiriman surat dinas Pos pusat	43.000	99.000	100,00
beban Jasa Profesi	-	-	
beban Jasa Lainnya	39.278.312	9.407.354	-
beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.166.000	23.757.509	43,81
beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.116.352	66.907.450	1,81
beban Perjalanan Dinas Biasa	475.853.780	168.220.758	182,87
beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	98.000.000	-	-
beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	-	-	#DIV/0!
beban Perjalanan Lainnya		-	-
beban Perjalanan Dalam Kota	405.823.000	-	-
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	-	23.438.000	
Jumlah Belanja Kotor	**9.782.353.165**	**436.745.747**	2.139,83
Pengembalian Belanja	0	-	-
Jumlah Belanja	**9.782.353.165**	**436.745.747**	2.139,83

Belanja Bantuan Sosial Rp. 0

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Triwulan III Tahun 2023 tidak mengalami perubahan karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak menerima Anggaran Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal Tanah Rp. 0

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Tanah Triwulan III Tahun 2023 tidak mengalami perubahan karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak menerima Anggaran Belanja Modal Tanah.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.0

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Triwulan III Tahun 2023 tidak mengalami perubahan karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak memiliki realisasi belanja

modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Triwulan III Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023 Triwulan III	REALISASI TA 2022 Triwulan III	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Belanja Modal gedung dan bangunan Triwulan III Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023 Triwulan III	REALISASI TA 2022 Triwulan III	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal gedung dan bangunan	0	0	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	-

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Triwulan III Tahun 2022 tidak mengalami perubahan karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak menerima Anggaran Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Belanja Modal Lainnya Rp.0

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Lainnya Triwulan III Tahun 2023 tidak mengalami perubahan karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak menerima Anggaran Belanja Modal Lainnya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.208.000.000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 208.000.000,- dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP dan TUP yang belum dipertanggungjawabkan. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Triwulan III 2023	31 Desember 2021
UP	60.000.000	-
TUP	148.000.000	-
Jumlah	148.000.000	-

Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak memiliki Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai yang merupakan SPM LS Perjalanan Dinas yang belum dibayarkan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	Triwulan III 2023	31-Dec-22
Sisa hibah Pilkada yang belum diSahkan	-	-
Pajak PPh yang belum disetor	-	-
LS Bendahara yang belum dibayarkan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak Rp.0

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	Triwulan III 2023	31 Desember 2022
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Tagihan TP/TGR Rp.35.331.245,-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.35. 331.245,- dan Rp.0 . Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Bagian Lancar TPA Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang TP/TGR Rp .0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang TP/TGR per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.-208.453,- dan Rp.0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Belanja Dibayar di Muka Rp.0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian

Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	Triwulan III 2023	31 Desember 2022
Belanja dibayar dimuka	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Persediaan Rp. 0,-

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Septemer 2023 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	Triwulan III 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi		-
Barang untuk Pemeliharaan		-
Bahan Baku		
Barang Persediaan lainnya utk dijual/diserahkan kemasyarakat		-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Persediaan belum Diregister Rp.0

C.10 Persediaan Belum Diregister

Nilai Persediaan belum deregister per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp0,-.Persediaan belum diregister merupakan belanja barang persedian yang telah di beli tetapi belum dicatat atau diinput kedalam aplikasi Persedian.

Tagihan TP/TGR Rp.35.122.792,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.35.122.792. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu

kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

TPA
Rp.0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Rp.0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tanah
Rp.415.483.968,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 415.483.968,- dan Rp.415.483.968 tidak terjadi perubahan karena Kantor KPU Mendapatkan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Pasaman.

Rincian Tanah

Jenis	Triwulan III 2023	Triwulan III 2022
Tanah	415.483.968	415.483.968
Jumlah	**415.483.968**	**415.483.968**

Peralatan dan Mesin
Rp. 2.126.879.118,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 2.126.879.118,- dan Rp. 2.462.592.638,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januri 2023	**2.550.892.638**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	
Saldo per 30 September 2023	**2.550.892.638**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2022	-424.013.520
Nilai Buku per 30 September 2023	**2.126.879.118**

Gedung dan Bangunan Rp.412.582.000,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 September 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Sebesar Rp. 412.582.000,- dan Rp. 412.582.000,-. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dapat terlihat sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	**412.582.000**
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi nilai	-
Saldo per 30 September 2023	**412.582.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(53.582.080)
Nilai Buku per 30 September 2023	**358.999.920**

Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Aset Tetap Lainnya Rp.40.000.000,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.40.000.000 dan Rp.40.000.000. Aset tetap tersebut berupa renovasi gedung dan bangunan yang dilakukan terhadap gedung dan kantor yang masih berstatus pinjam pakai dari Pemda Kabupaten Pasaman sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam aset gedung dan bangunan. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. yang merupakan

pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(1.869.020.727,-)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp. (1.869.020.727,-) dan Rp (2.140.291.353,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.086.709.273	1.804.772.231	281.937.042
2	Gedung dan Bangunan	53.582.080	64.298.496	-10.716.416
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		**2.140.291.353**	**1.869.070.727**	**271.220.626**

Aset Tak Berwujud Rp.0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Rp.0,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 0 dan Rp.26.368.800. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	**26.368.800**
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 September 2023	**26.368.800**
Akumulasi Penyusutan	(26.368.800)
Nilai Buku per 30 September 2023	**-**

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp.(26.368.800). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	26,368,800	26,368,800	0
Jumlah	**26,368,800**	**26,368,800**	**0**

Utang Kepada Pihak Ketiga I Rp.133.146.363,-

C.24 Utang Kepada Pihak Ketiga I

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga I per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 133.146.363 dan Rp. 9.044.000,-. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban kepada pegawai yang belum diterima oleh Pegawai pertanggal laporan.

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp.92.030.779,-

C.25 Utang YAng Belum Ditagihkan

Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 92.030.779,- dan Rp. 0,-. Utang yang belum ditagihkan merupakan kuitansi yang belum di SPMkan per tanggal 30 September 2023.

Uang Muka dari KPPN Rp.208.000.000,-

C.26 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 208.000.000 dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Pendapatan Diterima di Muka
Rp.0

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Ekuitas
Rp.935.820.009,-

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 935.820.009,- dan Rp. 1.193.635.637. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp.0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Beban Pegawai Rp.2.279.449.593,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Triwulan III 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.279.449.593 dan Rp. 2.210.376.724,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Semester I 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Triwulan III 2023	Triwulan III 2022
Beban Gaji	2.279.449.593	2.210.376.724
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	0
Beban Honorarium dan Vakasi		
Beban Lembur		-
Jumlah	**2.279.449.593**	**2.210.376.724**

Beban Persediaan Rp. 14.515.500,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Triwulan III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.515.500 dan Rp. 0,- mengalami Kenaikan sebesar 100%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Triwulan III 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Triwulan III 2023	Triwulan III 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	14.515.500	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**14.515.500**	**0**	**#DIV/0!**

Beban barang & Jasa Rp.8.714.467.263,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Triwulan III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.714.467.263,- dan Rp. 170.682.680,- mengalami penurunan Sebesar 92,34 Persen. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Triwulan III 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Triwulan III 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Triwulan III 2023	Triwulan III 2022	NAIK (TURUN) %
beban Keperluan Perkantoran	24.240.200	18.843.000	28,64
beban Honor Operasional Satuan Kerja	86.060.000	63.680.000	35,14
beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	0	23.438.000	-100,00
beban Barang Operasional Lainnya	25.100.000	25.340.000	-0,95
beban Bahan	528.564.050	12.740.500	4048,69
beban Honor Output Kegiatan	6.763.850.000		#DIV/0!
beban Barang Non Operasional Lainnya-Pandemi Covid		0	0,00
beban Barang Non Operasional Lainnya	1.168.761.055	3.202.000	100,00
beban Langganan Listrik	7.376.584	6.147.272	20,00
beban Langganan Telepon	5.131.532	6.170.654	-16,84
beban Langganan Air	1.268.800	614.900	106,34
Pengiriman surat dinas	43.000	99.000	-56,57
beban Sewa	36.150.000	1.000.000	0,00
Beban Jasa profesi			0,00
beban jasa lainnya	39.278.312	9.407.354	0,00
Jumlah	**8.685.823.533**	**170.682.680**	4988,87

Beban Pemeliharaan Rp.113.157.150,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Triwulan III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 113.157.150,- dan Rp. 90.664.959,- mengalami kenaikanan sebesar 24,75%. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Triwulan III 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Triwulan III 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Triwulan III 2023	Triwulan III 2022	NAIK (TURUN) %
beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.166.000	23.757.509	43,81
beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.936.150	66.907.450	17,98
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	0	100,00
Jumlah	**113.102.150**	**90.664.959**	24,75

Beban Perjalanan Dinas Rp.1.031.674.721,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Triwulan III 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.031.674.721,- dan Rp. 168.220.758,-. mengalami Kenaikan sebesar 16.31% dikarenakan sudah adanya kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2024. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Triwulan III 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Triwulan III 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Triwulan III 2022	Triwulan III 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	518.310.171	168.220.758	32,46
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	415.364.550	0	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	98.000.000		0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0		0,00
Jumlah	**1.031.674.721**	**168.220.758**	**16,31**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp.0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Triwulan III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi.

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Triwula III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.75.987.611,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Triwulan III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 75.987.611 dan Rp. 104.874.942,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Triwulan III 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Triwulan III 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Triwulan 2023	Triwulan III 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	99.516.734	- 100
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	5.358.208	- 100
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	
Jumlah Penyusutan	-	104.874.942	- 100
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain			-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	104.874.942	- 100

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Triwulan III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Lain-lain Rp.0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Triwulan III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap

Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp.4.951.433,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Triwulan III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.951.433 dan Rp.174.970.016,- terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian kegiatan non operasional Triwulan III 2023 dan 2022

URAIAN KEGIATAN NON OPERASIONAL	Triwulan IIII 2023	Triwulan III 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar	5.769.100	174.970.016	100
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(817.667)	-	
Jumlah Kegiatan non operasional	**4.951.433**	**174.970.016**	100

Pos Luar Biasa Rp.0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Triwulan III 2023 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.1.193.635.637,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.193.635.637 dan Rp. 1.637.378.793,-

Defisit LO Rp(12.162.006.413,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. (12.162.006.413,-) dan Rp. (2.569.850.047),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Triwulan III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai persediaan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi nilai persediaan untuk Triwulan III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0

E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisiih revaluasi aset tetap merupakan selisih atas revaluasi aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Triwulan III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

Koreksi Niali Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan aset tetap non revaluasi yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan dalam hal ini adalah adanya hibah tanah dari Pemda Kabupaten Pasaman. Koreksi atas Pendapatan untuk Triwulan III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

Transaksi Antar Entitas Rp. 11.904.190.785,-

E.7 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas pada Triwulan III tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.904.190.785,- dan Rp. 2.346.367.796,-.

Ekuitas Akhir
Rp.935.820.000,-

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada Triwulan III 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 935.820.000 dan Rp. 1.413.896.452,-

- **PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Pasaman Nomor: 01 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai Berikut :

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Ahdi Fitra Nugrana, SH
Pejabat Penanda tangan SPM	:	Irwan AP, SH
Bendahara Pengeluaran	:	Ratih, S. Ip
Staf Pengelola Keuangan	:	• Zona Travalina, A. Md • Baihaki, S. I. P
Pejabat Pengadaan barang dan jasa	:	Yorbalinda, SH

2. Pada tanggal 1 Maret 2022 KPU Kabupaten Pasaman melakukan pergantian Bendahara Pengeluaran sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Nomor :4 Tahun 2023 tanggal 1 Maret 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023, sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Ahdi Fitra Nugrana, SH
Pejabat Penanda tangan SPM	:	Irwan AP, SH
Bendahara Pengeluaran	:	Zona Travalina, A.Md
Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	Muhammad Irvan, S.IP
Staf Pengelola Keuangan	:	Ratih, S. IP
Pejabat Pengadaan barang dan jasa	:	Yorbalinda, SH

F.3 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Utama KPU

Dari hasil Pemeriksaan Inspektorat KPU RI total yang menjadi Temuan dan harus dikembalikan ke Kas Negara adalah sebesar Rp. 298.594.702,- dan KPU Kabupaten Pasaman telah menerbitkan SKTJM dengan nominal Rp. 25.591.300,. Sampai pada periode September 2023 KPU Kabupaten Pasaman telah menyetorkan TGR (Tuntutan Ganti Rugi) ke Kas Negara sebesar Rp. 27.171.200,- Rekapitulasi dan bukti setor terlampir.

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (656176) KPU KABUPATEN PASAMAN

Tgl Data : 30/10/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 30/10/23 10:04 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	208,000,000	0	208,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	**208,000,000**	**0**	**208,000,000**	
ASET TETAP				
Tanah	415,483,968	415,483,968	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,126,879,118	2,550,892,638	(424,013,520)	(16.62)
Gedung dan Bangunan	412,582,000	412,582,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	40,000,000	40,000,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,869,070,727)	(2,216,278,969)	347,208,242	(15.67)
JUMLAH ASET TETAP	**1,125,874,359**	**1,202,679,637**	**(76,805,278)**	**(6.39)**
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	35,331,245	0	35,331,245	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(208,453)	0	(208,453)	0.00
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	35,122,792	0	35,122,792	0.00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**35,122,792**	**0**	**35,122,792**	
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	26,368,800	(26,368,800)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(26,368,800)	26,368,800	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**0**	**0**	
JUMLAH ASET	**1,368,997,151**	**1,202,679,637**	**166,317,514**	**13.83**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	133,146,363	9,044,000	124,102,363	1,372.21
Utang Yang Belum Ditagihkan	92,030,779	0	92,030,779	0.00
Uang Muka dari KPPN	208,000,000	0	208,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**433,177,142**	**9,044,000**	**424,133,142**	**4,689.66**
JUMLAH KEWAJIBAN	**433,177,142**	**9,044,000**	**424,133,142**	**4,689.66**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	935,820,009	1,193,635,637	(257,815,628)	(21.60)
JUMLAH EKUITAS	**935,820,009**	**1,193,635,637**	**(257,815,628)**	**(21.60)**
JUMLAH EKUITAS	**935,820,009**	**1,193,635,637**	**(257,815,628)**	**(21.60)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1,368,997,151**	**1,202,679,637**	**166,317,514**	**13.83**

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM**
UNIT ORGANISASI	**: (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI	**: (0800) SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA	**: (656176) KPU KABUPATEN PASAMAN**

Tgl Data : 30/10/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 30/10/23 10:04 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :
FINAL

PASAMAN, 30 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YULIARDI, SH
197307031993031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (656176) KPU KABUPATEN PASAMAN

Tgl Data : 30/10/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 30/10/23 10:10 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,193,635,637	1,637,378,793	(443,743,156)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12,162,006,413)	(2,569,850,047)	(9,592,156,366)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	11,904,190,785	2,346,367,796	9,557,822,989	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(257,815,628)	(223,482,251)	(34,333,377)	-
EKUITAS AKHIR	935,820,009	1,413,896,542	(478,076,533)	-

Keterangan :
FINAL

PASAMAN, 30 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YULIARDI, SH
197307031993031002

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (656176) KPU KABUPATEN PASAMAN

Tgl Data : 30/10/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 30/10/23 10:09 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	75,987,611	104,874,942	(28,887,331)	(27.545)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	208,453	0	208,453	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	12,229,460,291	2,744,820,063	9,484,640,228	345.547
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(12,229,460,291)	(2,744,820,063)	(9,484,640,228)	345.547
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	4,951,433	174,969,998	(170,018,565)	(97.17)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	5,769,100	174,969,998	(169,200,898)	(96.703)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	817,667	0	817,667	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	62,502,445	18	62,502,427	347,235 ,705.5
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	62,502,445	18	62,502,427	347,235 ,705.5
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	67,453,878	174,970,016	(107,516,138)	(61.448)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(12,162,006,413)	(2,569,850,047)	(9,592,156,366)	373.257
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(12,162,006,413)	(2,569,850,047)	(9,592,156,366)	373.257

Keterangan :

FINAL

PASAMAN, 30 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YULIARDI, SH

197307031993031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KOMISI PEMILIHAN UMUM 076**
ESELON I : **KOMISI PEMILIHAN UMUM 01**
SATUAN KERJA : **KPU KABUPATEN PASAMAN 656176**

Tgl Data : 30/10/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 30/10/23 10:12 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	32,940,300	32,940,300	0	0	174,970,016	(174,970,016)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	32,940,300	32,940,300	0	0	174,970,016	(174,970,016)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	2,583,346,000	2,155,347,230	427,998,770	83	2,715,419,000	2,084,592,065	630,826,935	77
	BELANJA BARANG	13,812,834,000	9,781,783,855	4,031,050,145	71	1,780,923,000	436,745,747	1,344,177,253	25
	BELANJA MODAL	23,000,000	0	23,000,000	0	92,000,000	0	92,000,000	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KOMISI PEMILIHAN UMUM 076**
ESELON I : **KOMISI PEMILIHAN UMUM 01**
SATUAN KERJA : **KPU KABUPATEN PASAMAN 656176**

Tgl Data : 30/10/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 30/10/23 10:12 AM

lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	16,419,180,000	11,937,131,085	4,482,048,915	73	4,588,342,000	2,521,337,812	2,067,004,188	55
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :
FINAL

PASAMAN, 30 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YULIARDI, SH
197307031993031002